

Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan

SUTARYO
*JAKAWINARNA**
Universitas Sebelas Maret

Abstract: *This study aims to examine the relationship characteristics of Parliament (composition, size, leadership structure, tenure, and background, status, size local government) with the local government's performance in Indonesia. This study uses 91 local governments as a selected sample with purposive sampling method. The research data is secondary data obtained from the search results on the website of local government and Internal affairs Ministry of Republic of Indonesia. Data analysis using regression models with univariate and multivariate tests.*

The research proves that the size of parliament and status of local government affect the local government's performance both univariate and multivariate tested. The results also indicate that the interaction of size and education background, size and board membership composition affect the local government's performance in Indonesia. While for tenure, and structure of the leadership does not affect the local government's performance. These results prove that the implementation of monitoring in Indonesia is a building that is more than transaction cost governance that advance the individual utility or participants.

Keywords: *Characteristics of parliament, the local government's performance, Monitoring mechanism, Composition, Size, Structure, Leadership, Tenure, Background*

* Corresponding author: star.piet@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara *governance* dengan *outcome* organisasi pada entitas pemerintah daerah di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan menelaah pengaruh karakteristik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan hasil dari preferensi kebijakan yang diambil pihak eksekutif. Berdasarkan rerangka keagenan, komposisi perolehan suara partai politik merupakan faktor penentu efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi *monitoring* yang mempengaruhi preferensi eksekutif dalam memilih kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara teoritis komposisi DPRD akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Salah satu indikator kinerja pemerintah daerah adalah opini audit atas Laporan keuangan Pememerintah Daerah. Laporan hasil audit yang dirilis oleh BPK tahun 2009 atas LKPD menunjukkan bahwa hanya 4% LKPD seluruh Indonesia yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Lebih parah lagi, terdapat sekitar 20% pemerintah daerah yang gagal memenuhi tenggat waktu penyusunan laporan keuangan daerah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemerintahan daerah yang berhasil mencapai akuntabilitas keuangan seperti yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan daerah merupakan masalah yang signifikan di Indonesia.

Teori keagenan menyatakan bahwa adanya masalah dalam pelaporan keuangan menyiratkan indikasi adanya kelemahan *governance* pada entitas tersebut. Kelemahan *governance* diyakini oleh berbagai pihak merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara (ADB,

2000). Kesimpulan ini diperkuat oleh *Survey*¹ yang dilakukan oleh PWC bahwa *governance* menempati *ranking* tertinggi dalam pertimbangan investasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permintaan *governance* yang kuat di Indonesia dan memberikan justifikasi akademik mengenai pentingnya studi *governance* di Indonesia.

Kebutuhan akan *governance* telah menjadi sebuah keniscayaan pada industri biobank (Gottweis & Petersen, 2008), lingkungan hidup (Kanie & Haas, 2004) dan ilmu pengetahuan (Foss & Michailova, 2009). Selanjutnya, *governance* dipercaya sebagai faktor utama keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan fungsinya pada entitas institusional baik pada organisasi privat (Monks & Minow, 2004) maupun organisasi pemerintahan (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2006; Smismans, 2006).

Para ahli menyatakan bahwa konsep *governance* diturunkan dari nilai-nilai etika (Banks, 2004; Sison, 2008). Dengan demikian, *governance* merupakan sebuah *issue* yang tidak hanya terbatas pada aspek kepatuhan (*conformance*), namun *governance* lebih merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada nilai-nilai kepatutan (*sound of ethical conduct*) (Sims, 2003). Secara metodologis, *governance* diwujudkan dalam bentuk mekanisme pengambilan keputusan yang akan menentukan *outcome* sebuah organisasi. Oleh karena itu, *literature* empiris menyatakan bahwa *governance* berpotensi mempengaruhi keputusan pihak eksekutif dan *outcome* yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Konsep dasar dalam penelitian ini merujuk pada premis *governance* yang menyatakan bahwa *monitoring (control decision)* akan mempengaruhi tindakan pengambil keputusan manajemen (*management decision*).

¹ *Recovery* krisis tersebut hanya akan dapat dilakukan jika terdapat penanaman modal baik asing maupun domestik untuk menggerakkan perekonomian (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance). Bahkan *governance* yang kuat mempunyai nilai premium yang mencapai angka 28%.

B. STUDI PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Hubungan Keagenan dan Fitrah Konflik Keagenan

Menurut teori agensi, hubungan keagenan muncul ketika individu (prinsipal) memberikan penugasan kepada individu lain (agen) untuk melakukan jasa tertentu (Monks & Minow, 2004). Penugasan ini diikuti oleh pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya. Secara alami, masalah keagenan akan muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain (Jensen & Meckling, 1976). Asumsi ini menyiratkan adanya kemungkinan kegagalan agen dalam menunaikan penugasan yang diberikan karena agen lebih memilih untuk memaksimalkan kepentingan pribadi.

Untuk memperkecil kerugian yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, hubungan keagenan mengandalkan kontrak, dalam bentuk implisit maupun eksplisit, sebagai solusi terbaik pertama (Hart, 1995). Kontrak memuat kewajiban dan hak agen dan prinsipal yang disepakati secara *ex ante* oleh agen dan prinsipal. Namun demikian, agensi teori berasumsi adanya keterbatasan kemampuan individu dalam mengidentifikasi semua faktor kontijensi masa yang akan datang dan memuat faktor tersebut ke dalam kontrak (Baiman, 1990). Hal ini membuat individu yang terlibat dalam kontrak, secara alami, mempunyai keterbatasan dalam merancang kontrak yang sempurna.

Bentuk konflik dalam hubungan keagenan didasarkan pada distribusi kekuatan prinsipal dalam mempengaruhi keputusan agen. Jika distribusi kekuatan prinsipal terdispersi maka suatu organisasi akan mempunyai frekuensi prinsipal yang tinggi dengan kekuatan individual yang kecil (Shleifer & Vishny, 1986). Pada pola ini, konflik keagenan akan terjadi antara agen dan prinsipal. Sebaliknya, jika distribusi kekuatan prinsipal terkonsentrasi kepada satu atau kelompok prinsipal yang dominan, maka masalah keagenan akan berbentuk konflik

antara prinsipal yang mempunyai kekuatan mayoritas dengan minoritas (Demzets & Lenh, 1985). Bentuk konflik ini dipercaya sebagai titik tolak utama dalam perancangan *governance* sebuah organisasi.

2. Hubungan Keagenan dalam Organisasi Pemerintahan

Berdasarkan teori agensi, karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Pelimpahan ini menimbulkan pemisahan antara klaiman residu dengan otoritas pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas

Kontrak dapat bersumber dari kebiasaan (Adnan, Chatterjee & Nankervis, 2003), kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Shleifer & Vishny, 1986), dan ikatan hukum formal (Biondi, Canziani & Kirat, 2007). Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

Mengacu pada UU No 32 tahun 2004 sebagai rujukan kontrak formal, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. UU tersebut menyatakan bahwa bupati dan walikota bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pertanda

adanya pelimpahan wewenang dari rakyat kepada bupati dan walikota. Fakta adanya pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang kepada bupati dan walikota menunjukkan bahwa bupati dan walikota berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam rerangka hubungan keagenan.

DPRD dalam UU tersebut berperan sebagai mitra kerja bupati dan walikota yang berperan dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Selanjutnya, dinyatakan bahwa anggota DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung. Ketentuan ini menyiratkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam struktur pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Konstelasi berdasarkan peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa DPRD mempunyai karakteristik representatif yang bertugas melakukan *monitoring*. Oleh karena itu, DPRD dapat dianggap setara dengan *board* dalam *governance* berdasarkan konsep keagenan.

3. Konflik Keagenan dalam Pemerintah Daerah

Mengacu pada peraturan perundangan, bupati dan walikota yang berperan sebagai ekektif, mempunyai otoritas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik. Dalam tahap perencanaan, otoritas ini memungkinkan eksekutif untuk memilih dan mengusulkan program tertentu untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan ratifikasi. Dalam tahap pelaksanaan, otoritas tersebut memberikan keleluasaan kepada eksekutif untuk memilih strategi, *counterpart*, dan teknik-teknik tertentu dari satu set alternatif yang tersedia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksekutif mempunyai diskresi dalam tingkat tertentu pada tahap inisiasi maupun implementasi rencana program kerja.

Dalam teori agensi, diskresi yang dimiliki oleh eksekutif merupakan sumber utama konflik keagenan. Hal ini didasarkan pada suatu premis yang menyatakan bahwa diskresi memungkinkan pihak eksekutif membuat keputusan dengan tujuan yang berbeda dengan

kepentingan partisipan lain *governance* (Denis, 2001). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik keagenan pada organisasi pemerintahan daerah dapat terjadi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Program dan aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif didanai dari pendapatan yang dihasilkan oleh eksekutif, baik berupa pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain (UU 17/2003, UU 33/2004, UU 28/2009). Dari perspektif ini dapat dikatakan bahwa program maupun aktivitas pemerintahan daerah dapat dilihat sebagai sebuah distribusi alokasi pendapatan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa konflik keagenan terjadi dalam bentuk keputusan yang diambil oleh eksekutif berkenaan dengan pengelolaan sumber daya (Monks & Minow, 2004).

4. Hubungan Keagenan dan *Governance*

Teori agensi menyatakan bahwa *outcome* organisasi mempunyai hubungan negatif dengan perilaku agen (Jensen & Meckling, 1976). *Outcome* tersebut dapat berupa kinerja keuangan maupun informasi asimetris yang sengaja dipertahankan oleh agen. Walaupun prinsipal dapat menggunakan kontrak sebagai solusi terbaik pertama, kemampuan agen dan prinsipal yang terbatas menyebabkan perancangan kontrak yang sempurna menjadi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, hubungan keagenan memerlukan *governance* yang bertujuan memperkecil kemungkinan agen bertindak untuk kepentingan pribadi yang merugikan prinsipal (Denis, 2001).

Governance merupakan sebuah *sistim check and balance* yang ditujukan untuk meningkatkan capaian organisasi (Gillan, 2006). Rerangka keagenan mengasumsikan bahwa capaian organisasi merupakan hasil usaha eksekutif yang berhubungan dengan perilaku eksekutif dalam pengelolaan sumberdaya organisasi (John & Senbet, 1998). Perilaku merupakan turunan dari keputusan yang diambil eksekutif dari suatu set alternatif keputusan yang tersedia. Berdasarkan premis ini, dapat dikatakan bahwa sistim *governance* ditujukan

untuk mengarahkan keputusan eksekutif agar berperilaku optimal sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, sistem *check and balance* mempunyai tujuan antara (*immediate objective*) yaitu mengarahkan eksekutif agar berperilaku optimal dan tujuan akhir (*ultimate goal*) yaitu meningkatkan capaian organisasi.

Sistem *governance* didasarkan pada *monitoring* dan *bonding* yang dipercaya mampu mempengaruhi keputusan yang diambil oleh eksekutif dan dengan demikian perilaku eksekutif (Denis & Mc Connell, 2003). Sistem tersebut kemudian diwujudkan ke dalam mekanisme internal dan eksternal sebagai alat untuk mendisiplinkan pihak eksekutif. *Bonding* merupakan sebuah aransemen yang bertujuan mendorong eksekutif agar berperilaku selaras dengan kepentingan prinsipal sedangkan *monitoring* bertujuan untuk mencegah eksekutif berperilaku menyimpang dari kepentingan prinsipal. Walaupun *monitoring* dan *bonding* mempunyai mekanisme dan cara kerja yang berbeda, tujuan dari kedua aransemen tersebut adalah sama dalam hal mengarahkan eksekutif agar berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Dalam tingkatan operasional, *monitoring* diterjemahkan ke dalam suatu set mekanisme yang memungkinkan partisipan mempengaruhi keputusan eksekutif (Alchian & Demsetz, 1972). Mekanisme tersebut mempunyai dua tingkatan yaitu tingkatan institusional (eksternal) dan tingkatan entitas (internal). Tingkatan institusional mengandalkan sistem hukum dan persaingan untuk pengendalian entitas yang merupakan kondisi prasyarat bagi mekanisme internal untuk berfungsi secara efektif (Jensen & Ruback, 1983; La Porta et al., 1998; La Porta et al., 2000; Borio et al., 2004). Sistem hukum dimaksudkan untuk melindungi partisipan dari pelecehan hak (*expropriation*) oleh eksekutif dan memberikan kepastian kepada partisipan untuk menggunakan hak sesuai kontrak (Klapper & Love, 2004). Di lain pihak, persaingan merupakan sebuah alat untuk memberikan tekanan kepada eksekutif untuk

mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan partisipan dan menyediakan kesempatan kepada eksekutif untuk menggunakan reputasinya (Berglöf & Claessens, 2004).

Mekanisme internal organisasi merujuk pada distribusi kekuatan prinsipal sebagai pihak yang mendelegasikan otoritas kepada eksekutif dan meminta pertanggungjawaban eksekutif (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1986). Di samping itu, mekanisme internal juga dibangun dari asas keterwakilan prinsipal untuk secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan (Wagner III, Stimpert & Fubara, 1998). Seperti paparan sebelumnya, keterlibatan ini dilakukan melalui lembaga internal yang bertugas mengendalikan dan mengawasi keputusan eksekutif baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Pada sektor korporasi di Indonesia, lembaga ini disebut dewan komisaris sedangkan pada organisasi pemerintahan daerah lembaga ini disebut dewan perwakilan rakyat daerah.

Berbagai mekanisme tersebut mempunyai sifat saling tergantung (*interdependence*) yang dapat berupa substitusi maupun komplementer (Agrawal & Knoeber, 1996). Argumen substitusi meramalkan bahwa arti penting suatu *governance* tergantung dari ketersediaan mekanisme lain dalam suatu entitas. Argumen substitusi menyatakan bahwa suatu mekanisme dapat berjalan dengan baik jika terdapat mekanisme lain yang mendukung. Sifat saling tergantung ini menyebabkan perbedaan pada perancangan *governance* yang diadopsi oleh sebuah organisasi. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa sifat tersebut memungkinkan beberapa konfigurasi yang berbeda mampu menghasilkan output yang setara dalam mengarahkan perilaku eksekutif (Danielson & Karpoff, 1998). Oleh karena itu, sifat ini memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk membentuk portofolio mekanisme *governance* yang sesuai dengan kekhususan organisasi. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa sistem *governance* menunjukkan konfigurasi yang bervariasi antar organisasi.

5. Mekansime dan properti lembaga *monitoring* internal

Dalam *literature* keagenan, *monitoring* merupakan strategi *governance* yang dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme eksternal merujuk pada tiga tingkatan pasar pengendalian yang mencakup pasar produk, pasar manajer, dan pasar korporasi (Manne, 1965; Hart, 1983; Jensen & Ruback, 1983). Mekanisme internal mengacu pada struktur kepemilikan dan lembaga dalam organisasi yang mempunyai kedudukan dan otoritas tertentu sehingga memungkinkan lembaga ini melaksanakan fungsi pengendalian (Zahra & Pearce, 1989). Namun demikian, standar indikator *governance* menekankan pada tersedianya lembaga internal tersebut yang bertugas melakukan *monitoring* terhadap setiap keputusan strategis eksekutif (Dahya & McConnel, 2005).

Efektivitas lembaga internal dalam menjalankan fungsi *monitoring* ditentukan oleh independensi lembaga tersebut terhadap eksekutif (Dalton et al., 1998). Independensi memuat sebuah konsep penentuan nasib sendiri (*self determining concept*) yang memungkinkan lembaga internal mengambil keputusan yang terbebas dari pengaruh eksekutif. Beberapa kajian mengemukakan bahwa independensi dapat dicapai dengan cara meniadakan ketergantungan ekonomis dengan eksekutif dan membuat mekanisme tertentu dalam pemilihan anggota lembaga (Fama, 1980; Rahejaa, 2003; Adams & Ferreira, 2007). Fama (1980) menyatakan bahwa independensi anggota lembaga dapat membuat lembaga tersebut melakukan penilaian dan evaluasi secara obyektif atas keputusan eksekutif.

Di samping independensi, efektivitas lembaga *monitoring* internal juga ditentukan oleh tingkat pengetahuan para anggota (Coles, Daniel & Naveen, 2008). Pengetahuan yang cukup akan membuat lembaga *monitoring* mampu menelaah setiap keputusan eksekutif secara rasional sehingga lembaga tersebut mampu memilah antara keputusan opportunistik dari keputusan yang menguntungkan partisipan. Dalam berbagai *literature*, pengetahuan anggota lembaga *monitoring* internal bisa didapatkan dari latar belakang pendidikan, masa

kerja dan informasi mengenai organisasi secara keseluruhan (Vafeas, 2000; Park & Shin, 2004).

Adanya sifat ketergantungan antara mekanisme *governance* membuat efektivitas lembaga *monitoring* internal dalam konteks yang terisolasi menjadi dipertanyakan (Rediker & Seth, 1995). Dari sisi substitusi, pentingnya efektivitas lembaga tergantung dari efektivitas mekanisme lain. Jika mekanisme lain telah secara efektif menurunkan tingkat perilaku oportunistik agen, maka efektivitas lembaga internal menjadi kurang relevan. Dari sisi komplementer, efektivitas lembaga internal hanya akan dapat dicapai jika terdapat mekanisme lain yang kondusif terhadap kinerja lembaga *monitoring* internal.

6. Pengembangan Hipotesis

Literatur *governance* yang menginvestigasi hubungan antara *governance* dengan *outcome* organisasi dapat dibedakan ke dalam dua jenis yang saling berhubungan. Kelompok pertama melakukan penelaahan ekonometrik yang berfokus kepada pembuktian simulatif suatu model hubungan antara mekanisme *governance* dengan capaian organisasi. Riset yang termasuk dalam kelompok ini adalah, sebagai contoh, Henrich (2000), Gadhoun (2000), Jensen dan Meckling (1976), serta Faccio, Lang and Young (2001) dan Tirole (2001). Tujuan dari riset jenis ini adalah menyediakan sebuah model ekonometrik sebagai landasan bagi riset empiris. Kelompok kedua melakukan pengujian atas model yang telah dibangun oleh riset analitis dengan menggunakan data empiris. Walaupun ke dua jenis riset ini masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya suatu penelitian yang melakukan riset analitis dan empiris secara simultan dalam satu *paper*.

Sebagian besar riset *governance* termasuk dalam jenis riset empiris yang menguji pengaruh mekanisme *governance* terhadap *outcome* organisasi secara empiris. Pada tahap awal riset empiris, penelitian dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pengaruh *governance* tersebut dapat diuji dalam konsteks yang terpisah terisolasi (*isolated*) dan bersifat linear

(Claessens & Fan, 2002). Oleh karena itu isu metodologis dan teoritis menjadi dikesampingkan dan menjadi motivasi bagi riset *governance* generasi ke dua.

Perkembangan riset *governance* kemudian mengakomodasikan isu teoritis yang mencakup interdependensi, *non linearity*, dan *endogeneity* dan isu metodologis seperti pengukuran, interaksi, dan interseksi mekanisme (McColgan, 2001; Allen & Gale, 2002). Isu tersebut dianggap penting berdasarkan konsep generalisasi yang menjadi kerangka dasar paradigma positivis. Berdasarkan konsep ini, isu teoritis dan metodologis dianggap dapat menurunkan tingkat generalisasi dari satu populasi ke populasi lain. Hal ini didasarkan pada anggapan adanya kekhususan lingkungan dalam satu populasi yang berimbas pada kekhususan *governance*.

Riset empiris *governance* yang mengacu pada kerangka hubungan keagenan, pada sektor publik masih jarang dilakukan. Kelangkaan tersebut bukan hanya monopoli peneliti Indonesia namun juga terjadi di negara-negara lain. Hal ini menunjukkan adanya *gap* riset *governance* berdasarkan jenis organisasi. Walaupun kerangka keagenan dapat digunakan untuk menganalisis setiap entitas, sebagian besar riset empiris berfokus kepada sektor korporasi. Penelitian empiris *governance* dalam sektor korporasi dapat dikategorikan ke dalam pengujian efektivitas *monitoring* dan *bonding* terhadap luaran organisasi. Dimensi lain dalam riset yang mengambil setting sektor korporasi adalah mekanisme dan provisi. Dengan demikian studi empiris *governance* merupakan matriks yang menghubungkan dimensi *monitoring*, *bonding*, mekanisme, dan provisi.

Merujuk pada tipologi kerangka keagenan, sebagian besar riset *governance* pada organisasi pemerintahan menggunakan model *principal-agent model* yang dikembangkan oleh Baiman (1980). Model ini menekankan pada konsep *bonding* sebagai alat utama untuk mengarahkan agen agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, model

prinsipal agen mengandalkan karakteristik psikologis individu. Riset *governance* dengan rerangka prinsipal-agen dapat dilihat pada karya Latif (2009), Beni (2010), Febrina (2010).

Berbeda dengan model prinsipal-agen, bangunan *governance* dalam *Transaction Cost* (Williamson, 1979) dan Rochester berpijak pada asumsi yang menyatakan bahwa setiap individu akan selalu berusaha memaksimalkan utilitasnya. Kedua model tersebut menggunakan rujukan insentif ekonomis pihak yang terlibat dalam kontrak sebagai konsekuensi karakteristik kendali organisasi. Oleh karena itu *governance* dalam model tersebut didasarkan pada upaya untuk mengarahkan perilaku individu dengan aransemen dan mekanisme yang mempunyai konsekuensi ekonomi terhadap pihak yang terlibat dalam kontrak. Contoh riset *governance* dalam organisasi pemerintahan yang menggunakan model *Transaction Cost* dan *Rochester* adalah Kurniawati (2008) dan Retnoningsih (2009).

Penelitian berbasis model *transaction cost* dan *rochester* pada entitas pemerintahan di Indonesia sebagian besar terfokus pada karakteristik organisasi secara umum. Walaupun upaya ini tetap memberikan sumbangan pada *literature governance*, fokus tersebut membuat efek konfigurasi kendali organisasi terhadap *outcome* masih menjadi pertanyaan. Secara metodologis, kendali organisasi dapat dilihat dari kekuatan eksekutif dibandingkan dengan kekuatan penyeimbang. Dengan kata lain, pengaruh mekanisme *governance* terhadap keputusan eksekutif menjadi isu yang belum tersentuh. Hal ini diperparah dengan adanya kenyataan bahwa proksi yang digunakan untuk mengukur *outcome* menekankan pada masalah asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal. Sesuai dengan teori keagenan, *outcome* organisasi yang utama adalah kepentingan prinsipal secara langsung. Pada sektor korporasi, *outcome* utama organisasi adalah kesejahteraan prinsipal yang tercermin dalam harga saham maupun laba akuntansi. Pada organisasi pemerintahan, *outcome* utama tersebut dihasilkan dari keputusan eksekutif dalam mengelola dan membelanjakan sumber daya entitas untuk kepentingan fungsi pelayanan publik.

Motivasi riset *governance* organisasi pemerintahan di Indonesia seringkali terpaku pada pengujian empiris dari teori dasar dengan mengasumsikan adanya hubungan langsung dalam konteks isolasian. Dengan demikian, riset *governance* organisasi pemerintahan di Indonesia sebenarnya masih setara dengan riset *governance* generasi pertama. Tentu saja, hal ini akan mengakibatkan kelemahan metodologis dan teoritis riset *governance* generasi pertama terjadi pada riset *governance* organisasi pemerintahan di Indonesia. Sebagian besar riset *governance* di Indonesia meninggalkan asas sensitivitas yang berguna untuk menaksir kekuatan (*robustness*) hasil analisis (lihat Retnoningsih, 2009 dan Kurniawati, 2008). Dengan demikian generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas dengan banyaknya kondisi yang tidak ditelaah. Selanjutnya masalah *endogenity* dan *linearity* juga sering ditinggalkan oleh penelitian *governance* pada organisasi pemerintahan di Indonesia yang menyebabkan kesulitan interpretasi hasil penelitian.

Atas dasar urain di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa **komposisi dewan (KOMP), ukuran dewan (SZ), struktur kepemimpinan dewan (SK), latar belakang pendidikan dewan (BACKG), dan pengalaman kerja dewan (TNR) berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.** Selain itu, hipotesis dalam penelitian adalah bahwa **interaksi antar atribut atau karakteristik dewan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.**

C. METODA PENELITIAN

1. Model Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan *monitoring* dalam teori keagenan sebagai dasar rerangka konseptual yang dikembangkan oleh Alchian dan Demsetz, (1972) dan Vafeas (2000). Rerangka keagenan menyatakan bahwa efektivitas *monitoring* ditentukan oleh independensi, pengetahuan, dan *tenure* dari anggota lembaga *monitoring*. Pengujian empiris

hubungan antara independensi, pengetahuan, dan *tenure* anggota lembaga *monitoring* dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan ekonometrik sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KP_{it} = & \alpha + \beta_1 KOMP_{it} + \beta_2 SZ_{it} + \beta_3 SK_{it} + \beta_4 TNR_{it} + \beta_5 BACKG_{it} + \beta_6 KOMP_{it} * SZ_{it} \\
 & + \beta_7 KOMP_{it} * SK_{it} + \beta_8 KOMP_{it} * TNR_{it} + \beta_9 KOMP_{it} * BACKG_{it} + \beta_{10} SZ_{it} * SK_{it} \\
 & + \beta_{11} SZ_{it} * TNR_{it} + \beta_{12} SK_{it} * BACKG_{it} + \beta_{13} SK_{it} * TNR_{it} + \beta_{14} SK_{it} * BACKG_{it} + \\
 & \beta_{15} TNR_{it} * BACKG_{it} + \beta_{16} STATUS_{it} + \beta_{17} SZLG_{it} + \varepsilon_i
 \end{aligned}$$

dengan keterangan:

- KP_{it} : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah i tahun t
- $KOMP_{it}$: Komposisi anggota DPRD pada pemerintah daerah i pada tahun t
- SZ_{it} : Jumlah anggota DPRD pada pemerintah daerah i pada tahun t
- SK_{it} : Struktur Kepemimpinan DPRD pada pemerintah daerah i pada tahun t
- TNR_{it} : Tingkat *tenure* DPRD pada pemerintah daerah i pada tahun t
- $BACKG_{it}$: Pengetahuan DPRD pada pemerintah daerah i pada tahun t
- $STATUS_{it}$: Status pemerintah daerah kabupaten/ kota, pada tahun t
- $SZLG_{it}$: Ukuran pemerintah daerah kabupaten/ kota, pada tahun t
- $KOMP_{it} * SZ_{it}$: Interaksi KOMP dan SZ
- $KOMP_{it} * SK_{it}$: Interaksi KOMP dan SK
- $KOMP_{it} * TNR_{it}$: Interaksi KOMP dan TNR
- $KOMP_{it} * BACKG_{it}$: Interaksi KOMP dan BACKG
- $SZ_{it} * SK_{it}$: Interaksi SZ dan SK
- $SZ_{it} * TNR_{it}$: Interaksi SZ dan TNR
- $SK_{it} * BACKG_{it}$: Interaksi SK dan BACKG
- $SK_{it} * TNR_{it}$: Interaksi SK dan TNR
- $SK_{it} * BACKG_{it}$: Interaksi SK dan BACKG
- $TNR_{it} * BACKG_{it}$: Interaksi TNR dan BACKG
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_{17}$: Koefisien regresi
- ε_i : *Standard error*

2. Data dan Sampel

Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data properti DPRD adalah *website* pemerintah daerah, sedangkan sumber data kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah per tanggal 31 Desember 2009 adalah publikasi Kementerian Dalam Negeri melalui www.kemendagri.go.id.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Suatu pemerintah daerah akan digunakan sebagai sampel jika pemerintah daerah tersebut memenuhi kriteria; mempunyai *website* dan aktif, menyajikan data dan informasi anggota DPRD dalam *website*, dan terdaftar dalam SK Kemendagri Nomor 120-276 tahun 2011 tentang Status dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Atas dasar kriteria tersebut, diperoleh 197 pemerintah daerah sebagai sampel penelitian. Proses pemilihan sampel dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 1

3. Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan indeks (skor) berdasarkan SK Kemendagri Nomor 120-276 tahun 2011 tentang Status dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komposisi DPRD (KOMP), ukuran anggota DPRD (SZ), dan *tenure* anggota DPRD (TNR) serta pengetahuan (BACKG). Komposisi diukur dengan menggunakan proporsi antara partai pendukung kepala daerah jumlah anggota keseluruhan DPRD. Ukuran DPRD diukur dengan jumlah anggota DPRD, Struktur Kepemimpinan DPRD diukur dengan asal parpol pimpinan DPRD, Pengetahuan digunakan konstruk pendidikan dengan ukuran proporsi antara jumlah anggota DPRD yang mempunyai

latar belakang pendidikan S1 terhadap jumlah keseluruhan anggota DPRD. *Tenure* diukur dengan lama masa kerja anggota DPRD dengan ukuran rata-rata masa kerja anggota DPRD.

Sementara itu, penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol, yaitu; STATUS, adalah tipe pemerintah daerah yang menggunakan *dummy*, 0 untuk pemerintah kabupaten, dan 1 untuk pemerintah kota. Variabel kontrol lain adalah SZLG, yaitu ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan logaritma natural (LN) dari total aset pemerintah daerah.

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang pertama adalah statistik deskriptif. Deskripsi data penelitian dapat diungkapkan dengan tabel berikut ini.

INSERT TABEL 2

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata komposisi partai pendukung pemerintah terhadap total anggota DPRD adalah 53,78% dan rata-rata proporsi struktur kepemimpinan DPRD sebesar 57,25%, sehingga merupakan jumlah suara mayoritas dan berimplikasi pada dukungan politis yang kuat terhadap eksekutif daerah. Sementara itu, proposi anggota dengan pendidikan sarjana adalah 48,70% dan dengan rata-rata pengalaman adalah 2,23 tahun, maka modal yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan di daerah. Rata-rata skor indek kinerja pemerintah daerah adalah 2,51 yang mengindikasikan bahwa rata-rata pemerintah daerah mempunyai kinerja tinggi. Pemerintah daerah dengan kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kota Surakarta dengan skor 2,943 dan terendah adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan skor 0.940. Deskripsi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih terkendala dengan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitasnya.

Selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik dan diperoleh hasil bahwa data yang digunakan telah terbebas dari gejala asumsi klasik baik normalitas, autokorelasi,

heteroskedastisitas, maupun multikolinieritas. Analisis data berikutnya adalah pengujian dengan menggunakan model uji univariat dan uji multivariat yang dapat dipaparkan seperti berikut ini.

1. Uji *Univariate*

Uji *pearson correlation* digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel. Tabel *pearson correlation* di bawah menunjukkan bahwa ukuran DPRD (SZ) dan tipe/ jenis pemerintah daerah (STATUS) berhubungan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu, komposisi keanggotaan (KOMP), latar belakang (BACKG), struktur kepemimpinan (SK) dan pengalaman anggota DPRD (TNR) serta ukuran pemerintah daerah (SZLG) tidak berhubungan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota DPRD dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan jumlah anggota dewan lebih tinggi dapat memberikan atau menambah keragaman dalam berfikir sehingga dapat mengambil keputusan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, variabel control status pemerintah daerah yang dibedakan menjadi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa perbedaan status pemerintah kabupaten dan kota dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan. Pemerintah kota dengan atribut kemajuan atau kelebihan baik dalam infrastruktur dan sumberdaya dapat membantu pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik juga dibanding dengan pemerintah kabupaten. Hasil uji *pearson correlation* dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 3

2. Uji *Multivariate*

Pengujian multivariate dilakukan dengan regresi baik untuk masing-masing variabel independen maupun interaksi di antara variabel independen terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari seluruh model regresi sebagaimana tersaji dalam Tabel 4 dan Tabel 5 mempunyai nilai signifikansi F yang lebih kecil dari tingkat keyakinan 1%. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi tersebut layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian. Selain itu, dalam semua model regresi yang dilakukan, variabel STATUS sebagai kontrol menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga variabel STATUS berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

INSERT TABEL 4

Hasil pengujian dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh model regresi yang menggunakan interaksi antar variabel independen (model 1 sampai dengan model 21) menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan *fit* terbukti dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 1%, 5%, dan 10%. Dalam pengujian ini ukuran dewan (*size*) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah sebagaimana hasil pengujian model 1, 9, 11 dan 13. Sementara itu, interaksi SZ dengan atribut lain seperti KOMP, SK, dan BACKG serta TNR menunjukkan hasil yang berbeda, yang mana hanya interaksi SZ dan KOMP saja yang signifikan (lihat model 2) dan untuk interaksi lain tidak signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran DPRD yang diteraksikan dengan komposisi keanggotaan dapat menggambarkan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif. Dengan jumlah keanggotaan DPRD yang besar dan diperkuat dengan komposisi keanggotaan yang mendukung eksekutif, maka dapat memberikan dukungan dan pengawasan yang baik sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tanda koefisien regresi untuk variabel SIZE dan interaksi antara SIZE dan KOMP tersebut adalah positif. Dengan demikian semakin besar jumlah anggota DPRD semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Begitu pula untuk variabel STATUS mempunyai tanda koefisien positif yang dapat diartikan bahwa pemerintah kota lebih tinggi capaian kinerjanya dibanding dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah kota dengan sumber dana dan sumberdaya yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena dukungan sumberdaya tersebut, sehingga mampu menciptakan kinerja yang lebih baik.

Selain itu, dalam regresi 19, pengalaman anggota/ masa kerja yang diinterkasikan dengan latarbelakang pendidikan anggota dewan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengalaman kerja dan latarbelakang pendidikan yang diuji secara parsial berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai dalam hasil regresi 19, dan secara bersama diinteraksikan dengan latar belakang pendidikan anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa dengan masa kerja anggota dewan dan latar belakang pendidikan anggota dewan yang mendukung fungsi pengawasan dapat menjadikan pengawasan lebih baik sehingga pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih baik, sehingga mampu mencapai kinerja penyelenggaraan kinerja yang lebih baik juga. Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan dapat dijelaskan bahwa efektivitas lembaga *monitoring* internal ditentukan oleh tingkat pengetahuan para anggota lembaga *monitoring* (Coles, Daniel & Naveen, 2008). Pengetahuan yang cukup akan membuat lembaga *monitoring* mampu menelaah setiap keputusan eksekutif secara rasional sehingga lembaga tersebut mampu memilah antara keputusan opportunistik dari keputusan yang menguntungkan partisipan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa pengetahuan anggota lembaga *monitoring* internal bisa didapatkan dari latar belakang pendidikan, masa kerja dan informasi mengenai organisasi secara keseluruhan (Vafeas, 2000; Park & Shin, 2004).

Sementara hasil penelitian yang tidak mampu membuktikan pengaruh komposisi, struktur kepemimpinan DPRD, pengalaman, latar belakang terhadap *outcome* yang dalam hal ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa setiap individu atau kelompok dalam keanggotaan DPRD akan selalu berusaha memaksimalkan utilitasnya seperti dijelaskan dalam bangunan *governance* dalam *Transaction Cost* (Williamson, 1979). Dengan demikian bangunan *governance* pemerintah daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada pernyataan bahwa perilaku individu dengan aransemen dan mekanisme yang mempunyai konsekuensi ekonomi terhadap pihak yang terlibat dalam kontrak. Hasil pengujian model regresi dengan variabel interaksi dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 5

E. PENUTUP

1. Simpulan

Penelitian ini menguji hubungan karakteristik DPRD yang terdiri dari komposisi, ukuran, struktur kepemimpinan, pengalaman, dan pengetahuan terhadap *outcome* yang dinyatakan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka *monitoring* teori keagenan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran anggota dewan baik secara parsial maupun diinteraksikan dengan variabel lain dan status pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ukuran anggota, komposisi, masa kerja, dan latar belakang pendidikan merupakan atribut *monitoring* DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah. Jumlah anggota dewan dan latar belakang pendidikan dapat membuat DPRD mampu menelaah setiap keputusan eksekutif secara rasional sehingga lembaga tersebut mampu memilah antara keputusan opportunistik dari keputusan yang menguntungkan individu atau kelompok. Pengetahuan anggota DPRD bisa didapatkan dari latar belakang pendidikan sehingga latar belakang pendidikan juga berpengaruh terhadap opini LKPD.

Namun demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh atribut karakteristik lainya seperti; komposisi, dan struktur kepemimpinan baik secara parsial maupun ketika diinteraksikan dengan variabel lainya. Dengan demikian simpulan yang dapat dinyatakan bahwa bangunan *governance* pemerintah daerah di Indonesia masih lebih menggunakan *transaction cost* yang berusaha memaksimalkan utilitasnya yang didasarkan pada upaya untuk mengarahkan perilaku individu dengan aransemen dan mekanisme yang mempunyai konsekuensi ekonomi terhadap pihak yang terlibat dalam kontrak dibanding untuk meningkatkan kinerja agen atau eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahanya.

2. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan seperti berikut ini.

1. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data *website* pemerintah daerah yang terbatas dan banyak yang non aktif, sehingga penelitian ini terbatas menggunakan sampel penelitian sejumlah 197.
2. Penelitian ini hanya menggunakan atribut DPRD sebagai manifestasi *internal monitoring* maupun karakteristik eksekutif pemerintah daerah tanpa menggunakan *external monitoring* seperti audit.

3. Saran

Atas dasar keterbatasan di atas, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini.

1. Menggunakan sumber data lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perolehan data atribut DPRD sehingga dapat diperoleh jumlah sampel yang lebih besar.
2. Menambahkan variabel *internal monitoring* lain dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah seperti Inspektorat Daerah, dan *external monitoring* seperti audit BPK RI.

REFERENSI

- Adams, R. and Ferreira, D., 2007. "A Theory of Friendly Boards." *Journal of Finance* **62**(1): 217-250.
- Adnan, Z., Chatterjee, S. and Nankervis, A., 2003. *Understanding Asian Management: Transition and Transformation*. Perth, Vineyard Publishing
- Agrawal, A. and Knoeber, C. R., 1996. "Firm Performance and Mechanism to Control Agency Problems." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* **31**(3): 377-397.
- Alchian, A. and Demsetz, H., 1972. "Production, Information Costs, and Economic Organization." *American Economic Review* **62**(5): 777-795.
- Allen, F. and Gale, D. (2002). A Comparative Theory of Corporate *Governance*, The Wharton Financial Institutions Center, Working Paper No. 03-27, retrieved from <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/03/0327.pdf> at 07/10/2004.
- Baiman, S., 1990. "Agency Research in Managerial Accounting: A Second Look." *Accounting Organizations and Society* **15**(4): 341-371.
- Banks, E., 2004. *Corporate Governance: Financial Responsibility, Controls and Ethics*. New York, Palgrave Macmillan.
- Berglöf, E. and Claessens, S. (2004). Corporate *Governance* and Enforcement, World Bank Policy Research Working Paper No. 3409, retrieved from http://econ.worldbank.org/files/38742_wps3409.pdf at 07/10/2005.
- Biondi, Y., Canziani, A. and Kirat, T., Eds. (2007). *The Firm as an Entity: Implications for Economics, Accounting and the Law*. London, Routledge.
- Borio, C., Hunter, W., Kaufma, G. and Tsatsaronis, K., Eds. (2004). *Market Discipline Across Countries and Industries*. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press.
- Claessens, S. and Fan, J., 2002. "Corporate *Governance* in Asia: A Survey." *International Review of Finance* **3**(2): 71-161.
- Coles, J., Daniel, N. and Naveen, L., 2008. "Boards: Does One Size Fit All? ." *Journal of Financial Economics* **87**(2): 329-356.
- Dahya, J. and McConnel, J., 2005. "Outside Directors and Corporate Board Decisions." *Journal of Corporate Finance* **11**(1-2): 37-60.
- Dalton, D., Daily, C., Ellstrand, A. and Johnson, J., 1998. "Meta-Analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure, and Financial Performance." *Strategic Management Journal* **19**(3): 269-290.
- Danielson, M. and Karpoff, J., 1998. "On the Uses of Corporate *Governance* Provisions." *Journal of Corporate Finance* **4**(4): 347-371.
- Demzets, H. and Lenh, K., 1985. "The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences." *The Journal of Political Economy* **93**(6): 1155-1177.
- Denis, D., 2001. "Twenty-Five Years of Corporate *Governance* Research ... and Counting." *Review of Financial Economics* **10**(3): 191-212.
- Denis, D. and Mc Connell, J., 2003. "International Corporate *Governance*." *Journal of Financial & Quantitative Analysis* **38**(1): 1-36.
- Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2006. *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works*. New York, United Nations.
- Faccio, M., Lang, L. and Young, L., 2001. "Dividend and Expropriation." *The American Economic Review* **91**(1): 54-78.
- Fama, E., 1980. "Agency Problems and Theory of the Firm." *Journal of Political Economy* **88**(2): 288-307.
- Foss, N. J. and Michailova, S., 2009. *Knowledge Governance Processes and Perspectives*. Oxford, Oxford University Press.
- Gadhoun, Y. (2000). Family Control and Grouping: Possible Expropriation via Dvidens, Centre de Recherche en Gestion Working Paper No.: 14-2000, Retrieved from <http://www.esg.uqam.ca/esg/crg/papers/2000/14-2000.pd> at 05/01/2005.
- Gillan, S., 2006. "Recent Developments in Corporate *Governance*: An Overview " *Journal of Corporate Finance* **12**(3): 381-402

- Gottweis, H. and Petersen, A., Eds. (2008). *Biobanks: Governance in comparative perspective*. Oxon, Routledge.
- Hart, O., 1983. "The Market Mechanism as an Incentive Scheme." *Bell Journal of Economics* **14**(2): 366-382.
- Hart, O., 1995. "Corporate Governance: Some Theory and Implications." *The Economic Journal* **105**(430): 678-689.
- Heinrich, R. (2000). Complementarities in Corporate Governance: Ownership Concentration, Capital Structure, Monitoring and Pecuniary Incentives, Kiel Institute of World Economics, Working Paper No.: 968, retrieved from <http://www.uni-kiel.de/ifw/pub/kap/2000/kap968.pdf> at 03/01/2005.
- Hermalin, B. and Weisbach, M., 1998. "Endogenously Chosen Boards of Directors and Their Monitoring of the CEO." *The American Economic Review* **88**(1): 96-118.
- Hermalin, B. and Weisbach, M. (2003). Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature, FRBNY Economic Policy Review.
- Jensen, M. and Meckling, W., 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* **3**(305-360).
- Jensen, M. C. and Ruback, R. S., 1983. "The Market For Corporate Control: The Scientific Evidence." *Journal of Financial Economics* **11**: 5-50.
- John, K. and Senbet, L., 1998. "Corporate Governance and Board Effectiveness." *Journal of Banking & Finance* **22**(4): 371-403.
- Kanie, N. and Haas, P. M., Eds. (2004). *Emerging forces in environmental governance*. Tokyo, United Nations University Press.
- Klapper, L. and Love, I., 2004. "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets." *Journal of Corporate Finance* **10**(5): 703-728.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R., 1998. "Law and Finance." *The Journal of Political Economy* **106**(6): 1113-1155.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R., 2000. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* **58**: 3-27.
- Mandasari, P. 2009. *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government*. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret.
- Manne, H., 1965. "Mergers and the Market for Corporate Control." *Journal of Political Economy* **73**(2): 110-120.
- McColgan, P. (2001). Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature from a UK Perspective, Dept. Accounting & Finance University of Strathclyde Working Paper No. 06/0203, retrieved from <http://accfinweb.account.strath.ac.uk/wps/journal.pdf> at 30/11/2004.
- Monks, R. A. G. and Minow, N., 2004. *Corporate governance*. Oxford, Blackwell Publishing.
- Park, Y. and Shin, H., 2004. "Board Composition and Earnings Management in Canada." *Journal of Corporate Finance* **10**(3): 431-457.
- Rahejaa, C. (2003). The Interaction of Insiders and Outsiders in Monitoring: A Theory of Corporate Boards, Vanderbilt University Owen Graduate School of Management Working Paper No. 2001-25, Retrieved from http://papers.srn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=251594 at 07/10/2004.
- Rediker, K. and Seth, A., 1995. "Boards of Directors and Substitution Effects of Alternative Governance Mechanisms." *Strategic Management Journal* **16**(2): 85-99.
- Retnoningsih, H. 2009. *Mandatory Accounting Disclosure and Parliament Characteristics: An Empirical Study on Public Sector*. Tesis Magistkuntansi. Universitas Sebelas Maret.
- Shleifer, A. and Vishny, R., 1986. "Large Shareholders and Corporate Control." *The Journal of Political Economy* **94**(3, Part 1): 461-488.
- Sims, R. R., 2003. *Ethics and Corporate Social Responsibility—Why Giants Fall*. Westport, Praeger Publishers.
- Sison, A. J. G., 2008. *Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective*. Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
- Smismans, S., 2006. *Civil Society and Legitimate European Governance*. Northampton, Edward Elgar Publishing.
- Smith, R. and Walter, I., 2006. *Governing the Modern Corporation: Capital Markets, Corporate Control and Economic Performance*. New York, Oxford University Press.

- Tirole, J., 2001. "Corporate *Governance*." *Econometrica* **69**(1): 1-35.
- Vafeas, N., 2000. "Board Structure and the Informativeness of Earnings." *Journal of Accounting and Public Policy* **19**(2): 139-160.
- Wagner III, J. A., Stimpert, J. L. and Fubara, E. I., 1998. "Board Composition and Organizational Performance: Two Studies of Insider/outside Effects " *Journal of Management Studies* **35**(5): 655-677.
- Williamson, O., 1979. "Transaction-Cost Economics: The *Governance* of Contractual Relations." *Journal of Law and Economics* **22**(2): 233-261.
- Zahra, S. and Pearce, J., 1989. "Boards Of Directors And Corporate Financial Performance: A review of integrative model,," *Journal of Management* **15**(2): 291-334.

Lampiran

Tabel 1
Pemilihan Sampel

Keterangan	Jml
Pemerintah daerah di Indonesia per tahun 2009	494
Pemerintah daerah yang mempunyai <i>website</i> , tetapi tidak aktif atau tidak dapat di akses	(85)
Pemerintah daerah yang tidak mem-publish informasi data DPRD	(212)
Jumlah sampel penelitian	197

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	197	0,90	2,93	2,5105	0,27143
KOMP	197	0,33	0,72	0,5378	0,09501
SZ	197	15,00	48,00	37,8352	9,63704
SK	197	0,29	0,84	0,5257	0,15182
TNR	197	1,00	4,00	2,2747	1,00073
BACKG	197	0,12	0,94	0,4870	0,13135
STATUS	197	0,00	1,00	0,5385	0,50128
SZLG	197	24,53	29,89	27,6908	0,97911
Valid N (listwise)	197				

Keterangan: *KP* = kinerja penyelenggaraan pemerintah; *KOMP* = komposisi anggota DPRD; *SZ* = ukuran anggota DPRD; *SK* = struktur kepemimpinan DPRD; *TNR* = pengalaman anggota DPRD; *BACKG* = latar belakang pendidikan anggota DPRD; *STATUS*; tipe pemerintah daerah; *SZLG* = ukuran pemerintah daerah.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 3
Uji Univariat
Pearson Korrelation

Karakteristik DPRD Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

VARIABEL	KP	KOMP	SZ	SK	TNR	BACKG	STATUS	SZLG
KP	1.00							
KOMP	-0.153	1.00						
SZ	0.319**	-0.639**	1.00					
SK	-0.196	0.618**	-0.584**	1.00				
TNR	0.078	0.037	0.037	-0.026	1.00			
BACKG	0.001	-0.076	0.074	-0.057	-0.002	1.00		
STATUS	0.292**	-0.187	0.423**	-0.217*	0.101	-0.108	1.00	
SZLG	0.033	-0.132	0.163	-0.178	0.024	-0.169	0.142	1.00

Keterangan: *KP* = kinerja penyelenggaraan pemerintah; *KOMP* = komposisi anggota DPRD; *SZ* = ukuran anggota DPRD; *SK* = struktur kepemimpinan DPRD; *TNR* = pengalaman anggota DPRD; *BACKG* = latar belakang pendidikan anggota DPRD; *STATUS*; tipe pemerintah daerah; *SZLG* = ukuran pemerintah daerah.

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*

Sumber: Data sekunder yang diolah

TABEL 4
Uji Multivariate
Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

	1	2	3	4	5	6
Constant	2,425 (60.205)***	2,261 (19.903)***	2,425 (60.205)***	2,425 (60.205)***	2,425 (60.205)***	2,201 (19.903)***
KOMP	-0.293 (-0.994)					0.163 (0.434)
SZ		0.007 (2.170)***				0.007 (2.170)***
SK			-0.248 (-1.343)			-0.089 (0.370)
TNR				0.013 (0.480)		0.013 (0.459)
BACKG					0.274 (1.305)	0.218 (1.048)
STATUS	0.158 (2.876)***	0.103 (1.741)*	0.158 (2.876)***	0.158 (2.876)***	0.158 (2.876)***	0.103 (1.741)*
SZLG	-0.005 (-0.191)	-0.009 (-0.334)	-0.008 (-0.289)	-0.002 (-0.087)	0.004 (0.122)	-0.005 (-0.173)
R Square	0.085	0.132	0.085	0.085	0.085	0.132
Ajd R square	0.075	0.112	0.075	0.075	0.075	0.112
F	8,237	6,663	8,273	8,273	8,273	6,663
Sig.	0.005***	0.002****	0.005****	0.005***	0.005***	0.002***

Keterangan: *KP* = kinerja penyelenggaraan pemerintah; *KOMP* = komposisi anggota DPRD; *SZ* = ukuran anggota DPRD; *SK* = struktur kepemimpinan DPRD; *TNR* = pengalaman anggota DPRD; *BACKG* = latar belakang pendidikan anggota DPRD; *STATUS*; tipe pemerintah daerah; *SZLG* = ukuran pemerintah daerah.

***. Signifikan pada level 0.01.

** Signifikan pada level 0.05.

*. Signifikan pada level 0.1.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 5
Uji Multivariate
Interaksi Karakteristik DPRD Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Constant	2,201	2,196	2,425	1,455	2,425	2,425	2,425	2,425	2,201	2,425
	(19.903)***	(16.153)***	(60.205)***	(12.806)***	(60.205)***	(60.205)***	(60.205)***	(60.205)***	(19.903)***	(60.205)***
KOMP	-0.039		-0.088		-0.293		0.14			
	(-0.034)		(-0.238)		(0.994)		(0.144)			
SZ	0.007								0.007	
	(2.170)***								(2.170)***	
SK			-0.248						0.179	
			(-1.343)						(0.227)	
TNR					-0.091					
					(0.605)					
BACKG							0.274			
							(1.305)			
KOMP*SZ	0.004	0.013								
	(0.468)	(1.769)*								
KOMP*SK			2,295	-0.282						
			(1,023)	(-1.233)						
KOMP*TNR					0.033	0.008				
					(0.662)	(0.168)				
KOMP*BACKG							-0.9	0.157		
							(-0.964)	(0.459)		
SZ*SK									-0.002	0.003
									(-0.301)	(0.493)
SZ*TNR										
SZ*BACKG										
SK*TNR										
SK*BACKG										
TNR*BACKG										
STATUS	0.103	0.119	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158	0.103	0.158
	(1.714)*	(2.034)**	(2.876)**	(2.876)**	(2.876)**	(2.876)**	(2.876)**	(2.876)**	(1.741)*	(2.876)**
SZLG	-0.010	-0.007	-0.004	-0.008	-0.013	-0.002	-0.002	0.001	-0.009	-0.002
	(-0.338)	(-0.233)	(-0.134)	(-0.290)	(-0.436)	(-0.085)	(-0.054)	(0.021)	(0.334)	(-0.060)
R Square	0.132	0.116	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.132	0.085
Ajd R square	0.112	0.096	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.112	0.075
F	6,663	5,800	8,273	8,273	8,273	8,274	8,275	8,273	6,663	8,273
Sig.	0.002***	0.004***	0.005***	0.005***	0.005***	0.006***	0.007***	0.005***	0.002***	0.005***

*Keterangan: KP = kinerja penyelenggaraan pemerintah; KOMP = komposisi anggota DPRD; SZ = ukuran anggota DPRD; SK = struktur kepemimpinan DPRD; TNR = pengalaman anggota DPRD; BACKG = latar belakang pendidikan anggota DPRD; STATUS; tipe pemerintah daerah; SZLG = ukuran pemerintah daerah, KOMP*SZ = interaksi antara KOMP dan SZ, KOMP*SK = interaksi = KOMP dan SK, KOMP*TNR = interaksi KOMP dan TNR, KOMP*BACKG = interaksi dan KOMP dan BACKG, SZ*SK = interaksi SZ dan SK, SZ*TNR= interaksi antara dan SZ dan TNR, SZ*BACKG = interaksi SZ dan BACKG, SK*TNR = interaksi SK dan TNR, SK*BACKG = interaksi SK dan BACKG, TNR*BACKG = interaksi TNR dan BACKG.*

***. Signifikan pada level 0.01.

** Signifikan pada level 0.05.

*. Signifikan pada level 0.1.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 5 Lanjutan
Uji Multivariate
Interaksi Karakteristik DPRD Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Constant	2,201 (19.903)***	2,425 (60.205)***	2,201 (19.903)***	2,304 (32.109)***	2,425 (60.205)***	2,425 (60.205)***	2,425 (60.205)***	2,425 (60.205)***	1,829 (6.479)***	2,425 (60.205)***	2,196 (16.153)***
KOMP											-0.335 (-1.139)
SZ	0.007 (2.170)**		0.007 (2.170)**								0.009 (0.331)
SK					-0.248 (-1.343)		0.047 (0.059)				0.406 (0.147)
TNR	-0.015 (-0.127)				0.013 (0.447)				0.193 (1.774)*		-0.28 (0.720)
BACKG			0.218 (1.048)				0.274 (1.305)		1,187 (2.068)**		0.266 (1.161)
KOMP*SZ											0.13 (1.769)*
KOMP*SK											0.111 (0.257)
KOMP*TNR											0.033 (0.653)
KOMP*BACKG											-1.446 (-0.687)
SZ*SK											-0.015 (-0.729)
SZ*TNR	0.000 (0.569)	0.001 (1.504)									0.003 (1.362)
SZ*BACKG			-0.13 (-0.878)	0.007 (2.030)							-0.021 (-1.537)
SK*TNR					-0.012 (-0.071)	-0.014 (-0.313)					0.003 (1.301)
SK*BACKG							-0.476 (-1.292)	-0.052 (-0.178)			-1.429 (-1.209)
TNR*BACKG									-0.387 (-1.709)*	0.035 (0.075)	-0.282 (-1.643)
STATUS	0.103 (1.741)*	0.158 (2,876)**	0.103 (1.741)*	0.135 (2.449)**	0.158 (2,876)**	0.158 (2,876)**	0.158 (2,876)**	0.158 (2,876)**	0.174 (3.114)***	0.158 (2,876)**	0.196 (2.304)**
SZLG	-0.009 (-0.303)	-0.003 (-0.095)	-0.004 (-0.148)	0.000 (-0.023)	-0.008 (-0.239)	-0.003 (-0.094)	-0.001 (-0.043)	-0.004 (-0.120)	-0.014 (-0.450)	0.001 (0.022)	-0.029 (-0.911)
R Square	0.132	0.085	0.132	0.126	0.085	0.085	0.085	0.085	0.134	0.085	0.116
Ajd R square	0.112	0.075	0.112	0.106	0.075	0.075	0.075	0.075	0.094	0.075	0.094
F	6,663	8,273	6,663	6,343	8,273	8,273	8,273	8,273	3,330	8,273	5,801
Sig.	0.002***	0.005***	0.002***	0.003***	0.005***	0.005***	0.005***	0.005***	0.014***	0.005***	0.004***

*Keterangan: KP = kinerja penyelenggaraan pemerintah; KOMP = komposisi anggota DPRD; SZ = ukuran anggota DPRD; SK = struktur kepemimpinan DPRD; TNR = pengalaman anggota DPRD; BACKG = latar belakang pendidikan anggota DPRD; STATUS; tipe pemerintah daerah; SZLG = ukuran pemerintah daerah, KOMP*SZ = interaksi antara KOMP dan SZ, KOMP*SK = interaksi = KOMP dan SK, KOMP*TNR = interaksi KOMP dan TNR, KOMP*BACKG = interaksi dan KOMP dan BACKG, SZ*SK = interaksi SZ dan SK, SZ*TNR = interaksi antara dan SZ dan TNR, SZ*BACKG = interaksi SZ dan BACKG, SK*TNR = interaksi SK dan TNR, SK*BACKG = interaksi SK dan BACKG, TNR*BACKG = interaksi TNR dan BACKG.*

***. Signifikan pada level 0.01.

** Signifikan pada level 0.05.

*. Signifikan pada level 0.1.

Sumber: Data sekunder yang diolah